

**AKIBAT HUKUM DEBITUR YANG MELAKUKAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG DALAM PERJANJIAN
SEWA MENYEWA YANG DI NYATAKAN PAILIT DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian
studi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

MOHAMAD SARIFUDIN

NPM. 5115500108

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI
2021**

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

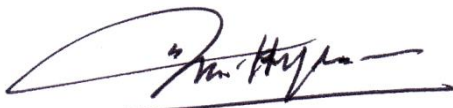
**AKIBAT HUKUM DEBITUR YANG MELAKUKAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN UTANG DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN
YANG DI NYATAKAN PAILIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

**Disusun Oleh :
MOHAMAD SARIFUDIN
NPM. 5115500108**

**Telah diuji dan dipertahankan dihadapan Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal :**

**Hari : Rabu
Tanggal : 24 Juni 2020**

Penguji I



H. TONI HARYADI, S.H., M.H.
NIDN. 0020045801

Penguji II



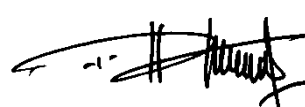
FAJAR DIAN ARYANI, S.H., M.H.
NIDN. 0608087702

Pembimbing I



DR. H. SANUSI, S.H., M.H.
NIDN. 0609086202

Pembimbing II



TIYAS VIKI WIDYASTUTI, S.H., M.H.
NIDN. 0619058703

**Mengetahui
Dekan,
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal**



Dr. H. Achmad Iryan Hamzani, S.H.I., M.Ag.
NIDN. 0615067604

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BARANG
BUKTI YANG BERNILAI EKONOMIS UNTUK
DIMUSNAHKAN**

Disusun Oleh :

**MOHAMAD SARIPUDIN
NPM. 5115500108**

**Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal :**

Pembimbing I



**DR. H. SANUSI, S.H., M.H
NIDN. 0609086202**

Pembimbing II



**TIYAS VIKA WIDYASTUTI, S.H., M.H.
NIDN. 0619058703**

**PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Mohamad Sarifudin

NPM : 5115500108

Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 21 April 1996

Program Studi : Ilmu hukum

Judul Skripsi : **Akibat Hukum Debitur Yang Melakukan Penundaan Pembayaran Utang Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Yang Di Nyatakan Pailit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil penulis sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Tegal, 29 Januari 2021
Yang Menyatakan



(Mohamad Sarifudin)

MOTTO

Adil ialah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang empunya dan jangan berlaku zalim di atasnya. Berani menegakkan keadilan, walaupun mengenai diri sendiri, adalah puncak segala keberanian.”
“Kesuksesan tidak akan bertahan jika dicapai dengan jalan pintas”
”Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan.”(QS.Al-Mujadalah:11)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT, dengan segala Hidayah-Nya yang Maha Kuasa sehingga dapat melalui detik-detik yang ternilai dalam hidup ini sampai terealisasikannya skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya yang tercinta yaitu Ibu Sudarningsih dan Bapak Seh Hadiwiyono yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil dan sudah mendukung anaknya untuk menempuh pendidikan hingga saat ini.
3. Kakak dan adik yang selalu memberikan semangat dalam penulisan Skripsi ini.
4. Kepada teman-teman saya, yaitu :
 - Erlin Febby, SH
 - Intan Mayliansyah
 - Audy Reyhan

Yang selalu memberikan motivasi

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, *alhamdulillah* penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW, yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd selaku Rektor Universitas Pancasakti beserta Para Wakil Rektor.
2. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti
3. Kanti Rahayu, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti.
4. H. Toni Haryadi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan, Administrasi Umum dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Pancasakti.
5. Imam Asmarudin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti.
6. Muhammad Wildan, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti.

7. Dr. H. Sanusi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 1 (satu) dalam skripsi ini yang telah memberikan bantuan petunjuk dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Tiyas Vika Widyastuti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 (dua) yang telah memberikan bantuan petunjuk dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
9. H Toni Haryadi, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I Ujian Skripsi yang memberikan masukan terarah terhadap skripsi ini.
10. Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II Ujian Skripsi yang memberikan masukan terarah terhadap skripsi ini.
11. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1, Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah SWT, sebagai amal shalih.
12. Segenap pegawai administrasi / karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
13. Orang tua, serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moril pada penulis dalam menempuh studi.
14. Kawan-kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 1 Februari 2020

Penulis

ABSTRAK

Mohamad Sarifudin, Akibat Hukum Debitur Yang Melakukan Penundaan Pembayaran Utang Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Yang Di Nyatakan Pailit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Tegal, 2021.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui akibat-akibat hukum apa yang di timbulkan terhadap debitur yang telah di nyatakan pailit dan bagaimana menyelesaikan kasus Penundaan Pembayaran terhadap perjanjian sewa – menyewa yang telah di nyatakan pailit.

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: Pertama, Akibat–akibat hukum yang di timbulkan dengan adanya pernyataan pailit adalah debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit di ucapkan (sejak pukul 00.00 waktu setempat). Kepailitan hanya mengenai harta pailit tidak mengenai barang–barang perlengkapan si pailit seperti (tempat tidur, pakaian, alat – alat pertukangan, buku – buku yang di perlukan dalam pekerjaan, makanan dan minuman untuk satu bulan, uang yang di terima dari upah atau gaji dan dari pendapatan anak – anaknya) dan tidak mengenai diri pribadi debitur pailit. Dalam hal ini Harta pailit di urus dan di kuasai kurator untuk kepentingan semua kreditur dan debitur, dan Hakim Pengawas memimpin serta mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan.

Kedua, penyelesaian Kasus yang telah di nyatakan Pailit: Di lakukan di Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan peradilan umum yang di ketuai oleh ketua Pengadilan Negeri karena ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan juga membawahkan Pengadilan Niaga. Perkara – perkara Kepailitan menurut UUK – PKPU di tentukan jangka waktu pemeriksaannya di tingkat Pengadilan Niaga, di tingkat kasasi, dan di tingkat Peninjauan Kembali. Dan tidak ada upaya Banding terhadap putusan pengadilan niaga hal ini bertujuan agar perkara Kepailitan akan berjalan lebih cepat.

Kata Kunci : Pembayaran Utang, Pailit, sewa-menyewa

ABSTRACT

Mohamad Sarifudin, Legal Consequences of Debtors Who Postpone Payment of Debt in a Leasing Agreement which is declared bankrupt in terms of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations: Law Studies Program Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal, 2021.

This research was conducted with the aim of knowing what legal consequences were caused to debtors who had been declared bankrupt and how to resolve cases of postponement of payments against lease agreements that had been declared bankrupt. By using the normative juridical research method, it can be concluded: First, the legal consequences arising from a bankruptcy statement is that the debtor loses his right to control and manage his assets which are included in the bankruptcy estate, from the date of the pronouncement of the bankruptcy declaration (since 00.00 local time). Bankruptcy is only about bankruptcy assets, not regarding the bankruptcy's equipment such as (beds, clothing, woodworking tools, books needed for work, food and drink for one month, money received from wages or salaries and from the income of his children) and not personally about the bankrupt debtor. In this case, the bankruptcy assets are managed and controlled by the curator for the benefit of all creditors and debtors, and the Supervisory Judge leads and supervises the implementation of the bankruptcy course.

Second, settlement of cases that have been declared bankrupt: This is carried out at the Commercial Court, which is in the general court environment chaired by the head of the District Court because the head of the District Court is also in charge of the Commercial Court. Bankruptcy cases according to the UUK - PKPU are determined by the time period for examination at the Commercial Court level, at the cassation level, and at the Reconsideration level. And there is no attempt to appeal the decision of the commercial court, this is aimed at making the Bankruptcy case run faster.

Keywords: Debt Payment, bankruptcy, leasing

DAFTAR ISI

Halaman	
Halaman Judul.....	i
Lembar Berita Acara Ujian Skripsi.....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Pernyataan.....	v
Abstrak	vi
Abstract	vii
Halaman Motto.....	viii
Halaman Persembahan	ix
Kata Pengantar	x
Daftar Riwayat Hidup	xii
Daftar Isi.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN PENELITIAN	7
D. MANFAAT PENULISAN	7
E. PENELITIAN TERDAHULUAN	8
F. METODE PENELITIAN	10
G. SISTEMATIKA PENULISAN	14

BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN	16
a. Pengertian perjanjian.....	16
b. Unsur Perjanjian	21
c. Syarat-Syarat Perjanjian	25
d. Asas-Asas Perjanjian.....	30
e. Macam-Macam Perjanjian	34
B. TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN	31
a. Pengertian dan Dasar Hukum Pailit	38
b. Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Pailit	43

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Kasus Penundaan Pembayaran Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Yang Telah Di Nyatakan Pailit	51
B. Akibat Hukum Debitur yang Melakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ...	58

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN	64
B. SARAN	65
DAFTAR PUSTAKA	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era perkembangan globalisasi yang semakin pesat memberikan dampak pada berbagai sektor terutama dalam sektor perekonomian, seperti halnya semakin banyaknya pendirian suatu perusahaan. Dampak tersebut pula yang bahkan membuat semakin banyaknya orang perorangan maupun kelompok yang melakukan berbagai macam cara dalam mendirikan suatu perusahaan, salah satunya dengan meminjam dana untuk mendirikan suatu perusahaan tersebut. Dari hal inilah yang menyebabkan adanya kewajiban seorang debitur harus melunasi utang-utangnya kepada kreditur.

Banyak jalan yang dilalui seorang debitur dalam melunasi utang-utangnya, seperti mengajukan peradamaian dalam PKPU.¹ Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau yang selanjutnya disebut dengan PKPU merupakan suatu lembaga dalam Hukum Kepailitan yang memberikan perlindungan terhadap debitur yang mempunyai kemauan untuk membayar utangnya dan beritikad baik. Dengan melalui PKPU, debitur diusahakan akan dapat terhindar dari kepailitan akibat tidak dapat membayarkan utangnya tidak tepat waktu.

¹ Man. S. Sastrawidjaja, 2006, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, h. 202.

Istilah penundaan kewajiban pembayaran utang pada umumnya sering di hubungkan dengan masalah “*insolvensi*” atau “keadaan tidak mampu membayar” dari debitur atas utang - utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat di tagih seketika. Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) harus ditetapkan oleh Hakim Pengadilan atas permohonan dari debitur yang berada dalam keadaan “*insolvensi*” tersebut.² PKPU sendiri sesungguhnya merupakan bentuk perlindungan terhadap debitur yang masih beritikad baik untuk membayar hutang-hutangnya kepada seluruh krediturnya. PKPU sendiri diatur dalam Pasal 222 s/d Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam Pasal 222 ayat (1) disebutkan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini dapat diajukan oleh:

1. Debitur

Debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur yang tidak dapat, atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU, dengan maksud untuk mengajukan Rencana Perdamaian, yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya kepada kreditur.³

2. Kreditur

² <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/11514/11117>, diakses pada tanggal 24 Februari 2019 Jam 18.30 WIB

³ Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tersebut tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon ke Pengadilan Niaga, agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan si debitur mengajukan rencana perdamaian kepada mereka, yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditur-krediturnya.⁴

3. Pengecualian, terhadap debitur bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga Kliring dan Penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, Perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun dan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka:⁵

a. Dalam hal debiturnya adalah bank, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh kreditur terhadap bank tersebut, atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh debitur bank ini sendiri, hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.

b. Dalam hal debiturnya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, maka permohonan penundaan kewajiban

⁴ Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁵ Pasal 223 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

pembayaran utang debitur ini atau oleh krediturnya, hanya dapat diajukan oleh atau melalui badan pengawas pasar modal.

c. Dalam hal debiturnya adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh debitur ini atau oleh para krediturnya, hanya dapat diajukan oleh atau melalui Menteri Keuangan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sendiri adalah peraturan khusus yang dibuat dalam rangka mendukung ketentuan Pasal 1131 dan 1132 dalam KUH Perdata. Undang-Undang ini timbul akibat adanya kekhawatiran kreditor melakukan pemangkiran atas pelunasan utang oleh debitur yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka kreditor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit. Selama putusan permohonan pernyataan pailit belum ditetapkan dapat pula mengajukan untuk menetapkan sita jaminan atas sebagian atau keseluruhan harta kekayaan debitur. Sebab debitur tersebut dapat melakukan kecurangan atas keseluruhan harta kekayaannya dengan cara mengalihkan seluruh kekayaannya sebelum ditetapkannya pernyataan pailit.

Kepailitan di Indonesia masih baru dan studi mengenai permasalahan yang berkaitan tentang pemberian jaminan untuk pengajuan sita pada pemeriksaan kepailitan belum pernah diteliti, maka penulis tertantang untuk menulis mengenai studi tersebut. Permohonan pernyataan pailit yang disertai pemberian jaminan

untuk pengajuan sita dalam sengketa kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam penulisan ini dapat memberikan jawaban atas persoalan akibat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).⁶

Dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang tanpa diberi kewenangan oleh pengurus, debitur tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau memindahkan hak atas sesuatu bagian hartanya yang telah dijamin kepada kreditur, sebagaimana diatur dalam Pasal 240 UUK No. 37 Tahun 2004.

Apabila debitur melakukan tindakan hukum tanpa mendapat kewenangan dari pengurus, maka pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitur tidak dirugikan karena tindakan debitur tersebut. Kewajiban-kewajiban debitur yang dilakukan tanpa mendapat kewenangan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya PKPU, hanya dapat dibebankan kepada harta debitur sepanjang hal itu menguntungkan harta debitur.⁷

Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak menghentikan perkara yang sudah mulai diperiksa ataupun menghalangi pengajuan perkara baru. Walaupun demikian, dalam hal perkara yang semata-mata mengenai tuntutan pembayaran suatu piutang yang telah diakui oleh debitur itu sendiri, akan tetapi kreditor tidak mempunyai kepentingan untuk mendapat sesuatu putusan guna melaksanakan haknya terhadap pihak ketiga, setelah tentang pengakuan tersebut di atas dicatat,

⁶ Sutan Remi Sjahdeni, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hal 56

⁷ *Ibid*, hlm. 55

maka hakim dapat menanggukhan pengambilan keputusan mengenai hal itu sampai akhir PKPU.⁸

Dalam hal perjanjian sewa menyewa, apabila debitor bertindak sebagai penyewa suatu barang segera setelah PKPU dimulai, dengan kewenangan dari pengurus dapat mengakhiri sewa tersebut untuk sementara, asalkan pemberitahuan untuk menghentikan sewa itu dilakukan menjelang suatu waktu perjanjian itu akan berakhir menurut kebiasaan setempat. Dalam melakukan penghentian hendaknya diindahkan pula jangka waktu menurut perjanjian atau menurut kelaziman, dengan ketentuan bahwa jangka waktu 90 hari adalah cukup (Pasal 251 ayat (1) dan (2) UUK Tahun 2004).

Dengan dibayarkan uang sewa yang telah dibayar sebelumnya, maka sewa tersebut tidak boleh dihentikan sampai menjelang hari akhir waktu untuk mana pembayaran uang telah dilakukan. Hingga sejak putusan PKPU sementara diucapkan maka uang sewa merupakan utang harta debitor.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat rancangan penelitian dengan judul: **“Akibat Hukum Debitur Yang Melakukan Penundaan Pembayaran Utang Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Yang Di Nyatakan Pailit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸ Mohamad Chaidir Ali, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hal 25.

- a. Bagaimana menyelesaikan kasus Penundaan Pembayaran terhadap perjanjian sewa – menyewa yang telah di nyatakan pailit?
- b. Bagaimana akibat hukum debitur yang melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004?

B. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Untuk mengetahui prosedur dari penundaan kewajiban pembayaran utang menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
2. Untuk mengetahui akibat hukum debitur yang melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

C. Manfaat Penulisan

1. Secara Teoritis

Diharapkan pembahasan permasalahan dari penulisan penelitian yang dilakukan penulis akan memberikan dampak pemahaman dan sikap kritis dalam menghadapi pengetahuan tentang kedudukan hukum debitur dalam perjanjian sewa menyewa akibat penundaan kewajiban pembayaran utang, selanjutnya hasil penelitian ini dapat digunakan dalam memberikan manfaat bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya pengetahuan ilmu hukum keperdataan.

2. Secara Praktis

Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi masukan bagi para pembaca, baik dikalangan akademial maupun peneliti yang mengkaji masalah yang sejenis ke dalam suatu pemahaman yang komprehensif tentang sejauh mana kedudukan hukum debitur dalam perjanjian sewa menyewa akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran utang yang diharapkan dapat mendapat wawasan tentang akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perjanjian sewa menyewa menurut Undang-Undang No 37 Tahun 2004.

D. Penelitian Terdahulu

Melalui hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan penulis, sumber-sumber lainnya, serta sepanjang pengetahuan penulis, terutama penelusuran penulis melalui internet, belum ada permasalahan yang seperti yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini. Akan tetapi masih ada penelitian yang mengangkat tema yang didalamnya terdapat variabel yang hampir serupa dengan variabel yang diangkat oleh penulis, sebagai berikut ini:

- a. Menurut penelitian yang berjudul “ Tinjauan Normatif Mengenai Konsekuensi Yuridis Debitur Pailit Terhadap Klausula Arbitrase Ditinjau Melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Pailitnya PT. Sri Melamin Rejeki (PT.SMR))”, yang dilakukan oleh Chintya Indah Pertiwi (2015) yang memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis konsekuensi yuridis kepailitan terhadap

klausula arbitrase di luar perkara kepailitan Pasca Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- b. Menurut penelitian yang berjudul “Utang dalam Sewa Menyewa Sebagai Dasar Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 59/Pdt.SusPKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst), yang dilakukan oleh Idris Sardi Sembiring dengan tujuan guna mengetahui dan menganalisis bentuk perdamaian dalam PKPU yang di sepakati para pihak yang terkait dengan putusan Mahkamah Agung No.59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- c. Menurut penelitian yang berjudul “Tinjauan yuridis terhadap Efektifitas proses Penundaan kewajiban pembayaran utang dan perdamaian sebagai alternatif penyelesaian utang piutang perusahaan”, yang dilakukan oleh Yunita Pohan, dengan permasalahan yang diteliti adalah Apakah proses PKPU sebagai upaya untuk mencapai perdamaian atas utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat efektif menghindarkan proses pailit terhadap debitor dan Bagaimanakah hambatan serta upaya penyelesaian atas utang piutang suatu perusahaan melalui proses PKPU diselesaikan dalam praktek di pengadilan niaga.

E. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah diperlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Metode penelitian sendiri adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁹ Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.¹⁰ Peter Marzuki sendiri berpendapat bahwa Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹¹ Berikut ini adalah langkah-langkah yang hendak ditempuh sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*) yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan internasional dan peraturan perundang-undangan.¹² Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang

⁹Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003, hlm. 1.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012, hlm. 5.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005, hlm. 60.

¹² Soedjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 9, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 23

hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.¹³

b. Tipe Penelitian

Dalam penelitiannya penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh¹⁴. Penelitian deskriptif ini dilakukan untuk melihat secara jelas, rinci, sistematis mengenai perihal permasalahan yang akan dibahas.

c. Sumber Data

Sumber utama penelitian normatif adalah bahan hukum, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.¹⁵

Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan yang diperoleh berasal dari sumber kepustakaan, yakni data yang didapatkan melalui kegiatan studi dokumen berupa buku-buku, makalah, peraturan internasional dan peraturan perundang-undangan

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 13-14.

¹⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 192.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 114

berkaitan dengan PKPU dalam perjanjian sewa menyewa. Bahan hukum sekunder yang hendak dikaji atau menjadi acuan berkaitan dengan permasalahannya dalam penelitian yaitu :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹⁶ Bahan hukum primer yang digunakan meliputi, UU No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan KUH Perdata.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁷ Seperti buku-buku, skripsi-skripsi, surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum.¹⁸

d. Metode Pengumpulan Data

Untuk menyempurnakan data-data yang dibutuhkan dalam rangka Kegiatan Penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa Metode, diantaranya sebagai berikut:

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), Hlm. 52

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, Hlm. 41

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Artinya peneliti mengkaji penelitian ini dengan membaca dan menelaah buku-buku yang berkaitan dan berhubungan langsung dengan materi pembahasan.

2. Studi dokumentasi

Yaitu penulis mengambil data dengan mempelajari dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait.

e. Metode Pengolahan Data

Selanjutnya data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh. Pendekatan kualitatif ini merupakan suatu analisis data yang menghasilkan data deskriptif, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁹

f. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur,

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, Cet.IV, hlm.158.

runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan analisis.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan untuk memudahkan pembahasan skripsi ini, maka penulisan ini dibagi ke dalam empat bab dan setiap bab dibagi ke dalam beberapa sub bab, maka sistematika penulisan yang direncanakan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan Penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka, dalam bab ini akan dikemukakan teori-teori yang melandasi pembahasan masalah yang diteliti antara lain tinjauan umum tentang perjanjian sewa menyewa dan tinjauan umum tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan hasil-hasil penelitian dalam skripsi ini.

Bab IV Penutup, Bab terakhir ini adalah penutup. Dalam bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan yang diperoleh dan saran-saran yang dirasakan perlu dikemukakan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm. 127

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah istilah yang lahir dan berasal dari bahasa Belanda *overeenkomst* dan *verbinten*. kedua istilah tersebut membuat para ahli hukum perdata Indonesia berbeda-beda dalam menafsirkan ke dalam istilah hukum Indonesia. Menurut Utrecht, *overeenkomst* diterjemahkan sebagai istilah perjanjian sedangkan *verbinten* diterjemahkan sebagai perutusan. Achmat Ichsan, menggunakan istilah perjanjian untuk *verbinten* dan persetujuan untuk *overeenkomst*. Kansil, *verbinten* diterjemahkan perikatan dan perjanjian untuk menterjemahkan *overeenkomst*. KUHPerdata terjemahan Subekti, SH dan Tjitro Sudibio menggunakan istilah perikatan untuk *verbinten* dan istilah persetujuan untuk *overeenkomst*.²¹

Dilihat dari perbedaan pendapat akan penafsiran istilah aslinya suatu perjanjian yang bersumber dari hukum perdata Belanda membuat kesimpang siuran dan menyulitkan dalam mempelajari hukum perjanjian. Oleh sebab itu, diharapkan dimasa mendatang hendaknya ada kesepakatan akan perihal penerjemahan istilah *overeenkomst* dan

²¹ Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (aanvullend recht) dalam Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 247

verbinten dalam bahasa Indonesia. Sedangkan Subekti berpendapat bahwa perjanjian ialah:²²

“suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”

Dalam definisi ini yang dimaksud suatu hal adalah sesuatu yang menjadi kesepakatan bersama yang harus dilaksanakan bagi kedua belah pihak yang mengadakannya. Selanjutnya menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian ialah:²³

“Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.

Sehingga bila disimpulkan, maka istilah perjanjian dapat dikatakan adalah perhubungan hukum antar dua orang atau dua pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan.

Perjanjian dalam KUHPerdato sendiri dapat ditemukan dalam Pasal 1313 KUHPerdato, yang menyebutkan bahwa:

“Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 1313 KUHPerdato hendak menjelaskan bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada

²² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 1990, hlm. 1

²³ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006 hlm.

suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata.²⁴

Perjanjian sendiri adalah salah satu sumber perikatan, disamping sumber lain. Perjanjian juga dinamakan persetujuan, oleh karena kedua pihak yang telah setuju melakukan sesuatu. Kontrak pun adalah salah satu nama lain dari perjanjian, akan tetapi lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis.²⁵ Hal mendasar perbedaan pengertian kontrak dan perjanjian, yaitu kontrak merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis, sedangkan perjanjian merupakan semua bentuk hubungan antara dua pihak dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu hal.

Perjanjian tidak membedakan apakah perjanjian tersebut dibuat tertulis maupun tidak, sehingga kontrak dapat diartikan sebagai perjanjian secara sempit, yaitu hanya yang berbentuk tertulis. Hal ini memberikan arti bahwa kontrak dapat disamakan dengan perjanjian. Pada saat kedua belah pihak telah sepakat satu sama lain untuk melakukan sesuatu, maka pada saat itu pula telah lahir perjanjian antara kedua belah pihak. Orang yang hendak membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya untuk mengikatkan dirinya. Pernyataan kedua belah pihak bertemu dan sepakat.²⁶

²⁴ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 7

²⁵ Subekti, *op. cit*, hlm. 1

²⁶ *Ibid*, hlm. 136.

Beberapa pakar hukum perdata mengemukakan pandangannya terkait definisi hukum perjanjian, sebagai berikut:²⁷

- 1) Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap tidak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut.
- 2) M. Yahya Harahap, mengemukakan bahwa perjanjian mengandung suatu pengertian yang memberikan suatu hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.
- 3) Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, yang berisi dua (een twezijdige overeenkomst) yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²⁸ Adapun yang dimaksud dengan suatu perbuatan hukum yang berisi dua atau tidak lain adalah satu perbuatan hukum yang meliputi penawaran dari pihak yang satu dan penerima dari pihak lain. Artinya perjanjian tidak merupakan satu perbuatan hukum, akan tetapi merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

²⁷ Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hlm. 2

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 110.

Dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE memuat pengertian kontrak elektronik, yaitu :

“perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”.

Perlu dipahami bahwa kontrak adalah nama lain dari suatu perjanjian seperti penjelasan sebelumnya. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menjelaskan Sistem elektronik yang menjadi media pembuatan kontrak diantaranya, yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem elektronik yang digunakan sebagai media oleh para pihak yang membuat kontrak elektronik, menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Perbedaan kontrak elektronik dengan kontrak pada umumnya ialah kontrak elektronik dibuat melalui sistem elektronik, sedangkan kontrak pada

umumnya dibuat tidak melalui sistem elektronik. Kontrak elektronik merupakan kontrak tidak bernama yang pembuatannya diwujudkan melalui perbuatan hukum riil berupa transaksi elektronik yang dilakukan oleh para pihak.²⁹

2. Unsur Perjanjian

Dalam suatu perjanjian di dalamnya pasti memiliki suatu unsur yang satu sama lainnya saling mengikat dan terhubung, sebagaimana sebagaimana yang dimaksud dengan pengertian unsur didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Unsur adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi bagi lagi, sehingga di dalam suatu perjanjian juga terdapat unsur-unsur yang terdiri dari, sebagai berikut:

a. Unsur Esensialia

Merupakan bagian pokok dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, harus mutlak adanya, sebab apabila perjanjian tidak memiliki bagian pokok, perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, bagian pokoknya harus ada harga barang yang diperjualbelikan.³⁰ Unsur esensialia ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian.³¹

b. Unsur Naturalia

²⁹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Bandung: CV Mandar Jaya, 2016, hlm. 239.

³⁰ Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2014 hlm. 111.

³¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 85.

Unsur *naturalia* ini adalah unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam suatu perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian.³² Unsur ini adalah unsur yang oleh Undang-Undang diatur tetapi oleh para pihak dapat disingkar dan diganti. Disini unsur tersebut oleh Undang-Undang diatur dengan hukum yang mengatur dan menambah (*reglend/aanvullend recht*). Contohnya: kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan (Pasal 1476 KUH Perdata) dan untuk menjamin/*vrijwaren* (Pasal 1491 KUH Perdata) dapat disampingkan atas kesepakatan para pihak dalam perjanjian.

c. Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.³³ Misalnya, perjanjian jual beli mobil, bukan hanya ada mesin dan karoserinya, melainkan ditambahkan harus ada AC, tape, dan variasinya.

³² Sudikno Mertokusumo, Op.Cit hlm 110-111.

³³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 14-15

Unsur pertama diatas lazimnya disebut dengan bagian inti perjanjian, sedangkan unsur kedua dan ketiga disebut sebagai non inti perjanjian. Perlu diketahui pula ada beberapa unsur-unsur yang harus ada secara umum dalam suatu perjanjian, yaitu:³⁴

a. Kata sepakat dari dua pihak atau lebih

Maksudnya disini kata sepakat dapat diartikan sebagai pernyataan kehendak. Perjanjian akan dapat terjadi apabila antara para pihak saling menyatakan kehendak, hal inilah yang menjadi perbedaan pokok antara perjanjian dengan perbuatan hukum sepihak. Dalam perbuatan hukum sepihak yang memiliki atau menyatakan kehendak hanya lahir dari satu pihak saja. Sebagai contoh perbuatan hukum membuat surat wasiat dan mengakui anak luar kawin.

b. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak

Kehendak para pihak saja tidak cukup untuk melahirkan suatu perjanjian. Oleh sebab itu kehendak tersebut harus dinyatakan. Kehendak yang telah dinyatakan oleh para pihak dan disepakati inilah yang membentuk suatu perjanjian.

c. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum

³⁴ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, 2010, hlm.5

Suatu janji atau pernyataan tidak selalu akan menimbulkan akibat hukum. Sebagai contoh janji antara beberapa orang untuk menonton bioskop, apabila dari salah satu orang tersebut tidak ikut menonton di bioskop, maka tidak akan timbul akibat hukum yang pada dasarnya dapat digugat dihadapan pengadilan. Akan tetapi yang timbul dalam hal tersebut hanyalah kewajiban sosial atau kesusilaan.

- d. Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik

Akibat hukum yang terjadi adalah untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban terhadap pihak yang lainnya atau bersifat timbal balik. Yang perlu diperhatikan adalah akibat hukum dari suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak dan tidak boleh merugikan pihak ketiga (Pasal 1340 KUH Perdata).

- e. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan
- Pada umumnya para pihak bebas menentukan bentuk perjanjian. Namun dalam beberapa perjanjian tertentu undang-undang telah menentukan bentuk yang harus dipenuhi. Misalnya untuk pendirian perseroan terbatas harus dibuat dengan akta notaris.

3. Syarat-Syarat Perjanjian

Perjanjian dapat dikatakan sah apabila dalam membuat perjanjian tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Seperti yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Adanya kesepakatan untuk mengikat dirinya;
- b. Kecapakan bertindak untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Adanya objek atau suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Syarat poin pertama dan kedua adalah syarat yang membahas tentang subjeknya, sedangkan poin ketiga dan keempat adalah syarat yang membahas perihal objeknya. Selanjutnya mengenai syarat sahnya perjanjian diatas akan dijelaskan lebih lanjut yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya kesepakatan untuk mengikat dirinya

Suatu syarat yang logis, karena dalam perjanjian setidaknya ada dua orang yang saling berhadap-hadapan dan mempunyai kehendak yang saling mengisi.³⁵ Artinya suatu perjanjian itu lahir karena adanya kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Apa yang diinginkan pihak satu kemudian yang dua

³⁵ J. Satrio, 1992, Hukum Perjanjian, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 365

juga harus sama yang diinginkan pihak yang satu atau mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, sehingga kata sepakat merupakan sesuatu yang sangat diperlukan dalam perjanjian. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu dapat dilihat/diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:³⁶

- Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- Bahasa yang sempurna dan lisan;
- Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya;
- Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

Jika dilihat dalam kehidupan sehari-hari dan kebiasaan masyarakat, perjanjian terbentuk dan dibuat dengan cara yaitu bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Perjanjian yang dibuat dengan tertulis memiliki tujuan yang dimana apabila suatu saat terjadi sengketa antara pihak maka perjanjian tertulis inilah alat bukti yang dapat digunakan. Di lain sisi

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*, Yogyakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 1987, hlm.7

dengan perjanjian tertulis inilah yang memberikan kepastian hukum dalam perbuatan hukum perjanjian.

2) Kecakapan bertindak untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Cakap (bekwaan) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa seperti yang tercantum dalam Pasal 330 KUHPerdata, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Adapun orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dalam Pasal 1330 KUHPerdata disebutkan sebagai berikut:

- a) Orang-orang yang belum dewasa;
- b) Orang yang ditaruh dibawah pengampuan; dan
- c) Perempuan yang telah kawin.⁷² (Lahirnya SEMA No. 3

Tahun 1963 dan Pasal 31 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka poin c sudah tidak berlaku lagi).

Perihal batasan umur dan tingkat kedewasaan tidak ditentukan dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan akan tetapi dibahas dalam Buku I KUH Perdata tentang Orang. Dalam Buku I KUH Perdata Pasal 330 menyatakan bahwa, seseorang

dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah. Oleh sebab itu, dalam melakukan perbuatan hukum perjanjian di Indonesia tidak diatur tentang tolak ukur kedewasaannya. Akan tetapi batasan umur tersebut hanya diatur dalam peraturan hukum yang mengatur tentang perorangan atau tentang hukum kekeluargaan. Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian adalah perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalan perjanjian kepada Hakim. Jika tidak dimintakan pembatalan maka perjanjian tersebut tetap berlaku bagi para pihak yang terkait dengan perjanjian tersebut.

3) Adanya objek atau suatu hal tertentu

Prestasi/pokok perjanjian adalah objek dari suatu perjanjian. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi bisa berupa kewajiban untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya, yang diperjanjikan harus cukup jelas. Pengertian bahwa prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya ialah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Menurut KUH Perdata hal tertentu itu adalah:

1. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau barang yang cukup

jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH Perdata).

2. Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUH Perdata).

Sebagai contoh dalam hal jual beli tanah harus jelas ukuran ukuran luas tanah dan letak dimana tempatnya. Apabila dalam isi pokok perjanjian, atau objek perjanjian, atau prestasi perjanjian tidak jelas, sulit bahkan bila tidak mungkin untuk dapat dilaksanakan, maka perjanjian itu batal.

4) Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat untuk sahnya perjanjian. Mengenai syarat ini Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Sah atau tidaknya kausa dari suatu perjanjian ditentukan saat perjanjian itu dibuat. Konsekuensi hukum atas perjanjian tanpa kausa/sebab yang halal adalah perjanjian tersebut batal demi hukum (Void / Null), kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Suatu sebab dikatakan halal sebagai mana diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata yakni perjanjian tersebut :

1. Tidak bertentangan dengan Undang-undang;

2. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum;

3. Tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya harus dipenuhi semuanya baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Dan apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.³⁷

4. Asas-asas Perjanjian

Dalam perjanjian terdapat beberapa asas penting yang perlu diketahui. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut :

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme pada Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata dinyatakan: “Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak”. Ini mengandung makna, bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya

³⁷ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm.33.

kesepakatan kedua belah pihak. Dengan demikian apabila kedua pihak saling sepakat, maka lahirlah perjanjian atau kontrak walaupun perjanjian atau kontrak tersebut belum berlaku pada saat itu.

b. Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta sunt Servanda*)

Asas *Pacta Sunt Servanda* atau yang sering disebut dengan asas kepastian hukum berhubungan dengan akibat perjanjian. Hal ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.³⁸ Sehingga ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam perjanjian serta disepakati oleh para pihak adalah memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak dan haruslah ditaati, bilamana terjadi pelanggaran atau penyimpangan dari salah satu pihak, maka akan berakibat pihak yang merasa dirugikan dapat menggugat atas dasar wanprestasi atau ingkar janji.

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat di analisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, dinyatakan: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Maksud ‘semua’ dalam pasal tersebut meliputi seluruh perjanjian baik yang sudah maupun belum diatur dalam

³⁸ Salim HS, *Op.Cit*, hlm. 157

undang-undang. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk³⁹:

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c) Mengadakan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;
- d) Menentukan bentuknya perjanjian, yang tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak sendiri adalah asas yang dalam perjanjian antara para pihak memiliki kehendak bebas membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikat diri dengan orang lain yang dia kehendaki, serta bebas dalam menentukan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian, dengan catatan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, baik ketertiban umum maupun kesusilaan. Artinya asas kebebasan berkontrak berarti bahwa setiap orang dapat menciptakan perjanjian-perjanjian baru yang tidak dikenal dalam perjanjian bernama dan yang isinya menyimpang dari perjanjian bernama yang diatur oleh undang-undang.⁴⁰

d. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun

³⁹ *Ibid*, hlm.158.

⁴⁰ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan pada umumnya*, Bandung: Alumni, 1999, hlm. 36

debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

e. Asas Itikad Baik

Asas ini dimuat dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata yang bunyinya: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan etikad baik.”

f. Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain, menumbuhkan kepercayaan di antara para pihak antara satu dengan yang lain akan memegang janjinya untuk memenuhi prestasi di kemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian tidak mungkin diadakan para pihak.

g. Asas Kebiasaan

Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti. Diatur dalam Pasal 1339 Jo Pasal 1347 KUHPerdata, Pasal 1339 KUHPerdata, dinyatakan :

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”

Pasal 1347 KUHPerdata dinyatakan: “syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk

dalam persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam persetujuan”⁴¹

h. Asas *Rebus sic stantibus*

Yaitu asas yang dapat digunakan untuk memutuskan perjanjian secara sepihak apabila terdapat perubahan yang mendasar/fundamental dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian internasional yang telah disepakati.⁴² asas *rebus sis stantibus* sebagai jalan untuk menanggihkan dan membatalkan perjanjian dengan memberi aturan atau persyaratan kepada negara atau para pihak yang tidak dapat melakukan kewajibannya atau membatalkan perjanjian dengan syarat-syarat tertentu yang juga dituangkan dalam isi perjanjian dan disepakati oleh para pihak.

5. Macam-Macam Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:⁴³

a. Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya, perjanjian jual-beli. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang paling umum terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban.

⁴¹ *Ibid*, hlm.159-160

⁴² <https://sujarman81.wordpress.com/2011/07/31/asas-asas-dan-peristilahan-hukuminternasional/#more-3>, diunduh pada tanggal 20 Jovember 2018, pukul 00.36 WIB.

⁴³ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 19

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya, hibah. Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

c. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama.

Perjanjian bernama merupakan perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1319 KUH Perdata yang berbunyi “semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum” atau dalam arti lain perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus karena jumlahnya terbatas, misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, penitipan barang, pinjam pakai, asuransi, perjanjian pengangkutan. Sedangkan perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas atau perjanjian itu timbul, tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat.

d. Perjanjian obligator dan kebendaan.

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini

sebagai pelaksanaan perjanjian obligator. Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadi perjanjian, timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak. Pembeli berhak menuntut penyerahan barang, penjual berhak atas pembayaran harga. Sebagai contoh ialah perjanjian jual-beli motor. Dimana Si A adalah Pembeli dan Si B adalah Penjual. Si A berhak atas motor yang telah dibelinya dari Si B akan tetapi Si A juga berkewajiban untuk memberikan uang pembayaran sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal itu pun sebaliknya untuk Si B berhak memperoleh bayaran dari hasil menjual motornya kepada Si A dan berkewajiban memberikan motornya kepada Si B.

e. Perjanjian Konsensual dan rill

Perjanjian konsensual adalah perjanjian di antara kedua belah pihak yang telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUHPerdara, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUPerdara). Namun demikian di dalam KUHPerdara ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Misalnya, perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUHPerdara), pinjam-pakai (Pasal 1740

KUHPerdata). Perjanjian yang terakhir ini dinamakan perjanjian rill.

f. Perjanjian campuran

Adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur dari berbagai perjanjian. Perjanjian ini tidak diatur dalam KUHPerdata maupun KUH Dagang. Misalnya : perjanjian sewa beli atau leasing yakni gabungan sewa menyewa dan jual beli.

g. Perjanjian non obligatoir

Adalah perjanjian yang tidak mengharuskan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu. Perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain. Jadi, objek perjanjian di sini adalah hak.

h. Perjanjian Tambahan (*Addendum*)

Perkembangan hukum perjanjian dimasyarakat dikenal adanya istilah perjanjian pokok dan perjanjian tambahan. Dapat dipahami bahwa perjanjian pokok mengacu pada jenis perjanjian sebagaimana diuraikan di atas, sedangkan perjanjian tambahan merupakan perjanjian yang baru ada atau dibuat kemudian setelah adanya perjanjian pokok

B. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pailit

Jika ditelusuri sejarah hukum tentang kepailitan, diketahui bahwa hukum tentang kepailitan itu sendiri sudah ada sejak zaman romawi. Kata bangkrut, yang dalam bahasa inggris disebut bankrupt berasal dari undangundang Italia yang disebut dengan bancarupta. Pada abad pertengahan di Eropa, terjadi praktek kebangkrutan yang dilakukan dengan menghancurkan bangku-bangku dari para banker atau pedagang yang melarikan diri secara diam-diam dengan membawa harta krediturnya.⁴⁴

Kata pailit berasal dari bahasa Prancis, *failite* yang berarti kemacetan pembayaran. Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris istilah pailit dapat ditemukan. Dalam bahasa Perancis, istilah *faillite* artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya disebut dengan *Le Faille*. Di dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah *faillit* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Sedangkan dalam bahasa Inggris digunakan istilah *to fail* dan kata di dalam bahasa Latin digunakan istilah *failire*.⁴⁵

Menurut Siti Soemarti Hartono,⁴⁶ dalam bukunya Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran, menyatakan bahwa, Kepailitan adalah

⁴⁴ Sunarmi, Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan Antara Indonesia (Civil Law System) Dengan Amerika Serikat (Common Law Sistem), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2004

⁴⁵ Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hal..26-27.

⁴⁶ Siti Soemarti Hartono , Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran, Dikutip dari Bahan Ajar dan Diskusi Khairulnas, Hukum Kepailitan. Fakultas Hukum UMSB. hal..1.

suatu lembaga dalam hukum perdata eropa (BW) yang tercantum dalam Pasal 1131 dan 1132.

Sedangkan menurut Poerwadarminta,⁴⁷ “pailit” artinya bankrupt, dan bangkrut artinya menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan, toko, dan sebagainya). Menurut Jhon M. Echlos dan Hasan Sadily⁴⁸, *bankrupt* artinya bangkrut, pailit dan bangkrut, pailit dan *bankruptcy* artinya kebangkrutan, kepailitan.

Menurut Imran Nating⁴⁹, kepailitan diartikan sebagai suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitur dapat dibagikan kepada para Kreditur sesuai dengan peraturan pemerintah. dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pailit adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan *bankrupt*,⁵⁰ dan yang aktivitasnya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar hutang-hutangnya.

Namun demikian, umumnya orang sering menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitur agar dicapainya perdamaian antara debitur dan para Kreditur atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para Kreditur. Pasal 1 angka 1

⁴⁷ Poerwadarminta, Kamus Besar Umum Indonesia, didalam Jono, SH, Perbandingan Hukum Kepailitan, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hal. 21.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Abdurrachman, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 89

Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan sebagai berikut: “kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

Munir Fuady menyamakan “istilah kepailitan dengan bangkrut” manakala perusahaan (atau orang pribadi) tersebut tidak sanggup atau tidak mau membayar hutang-hutangnya. Oleh karena itu, daripada pihak Kreditor ramai mengeroyok debitur dan saling berebutan harta debitur tersebut, hukum memandang perlu mengaturnya sehingga hutang-hutang debitur dapat dibayar secara tertib dan adil. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kepailitan adalah suatu sitaan umum yang dijatuhkan oleh pengadilan khusus, dengan permohonan khusus, atas seluruh aset debitur (badan hukum atau orang pribadi) yang mempunyai lebih dari 1 (satu) hutang/Kreditor dimana debitur dalam keadaan berhenti membayar hutang-hutangnya, sehingga debitur segera membayar hutang-hutangnya tersebut.⁵¹

Menurut Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal1 ayat (1) (selanjutnya disebut UUK-PKPU-PKPU), yang menyebutkan: “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

⁵¹ Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal.75

Pada Pasal 2 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa:

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Krediturnya.”

Berangkat dari pengertian dan unsur kepailitan tersebut diatas maka

esensi kepailitan secara singkat dapat dikatakan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitur untuk kepentingan semua Kreditur yang pada waktu debitur dinyatakan pailit mempunyai utang, sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Berdasarkan Pasal1 angka 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur.”

Bagi suatu perusahaan, utang bukanlah merupakan suatu hal yang buruk, asal perusahaan tersebut masih dapat membayar kembali. Perusahaan seperti ini biasa disebut perusahaan yang *solven*, artinya perusahaan yang mampu membayar hutang-hutangnya. Sebaliknya jika suatu perusahaan yang sudah tidak mampu membayar hutang-hutangnya lagi disebut *insolven*, artinya tidak mampu membayar.⁵²

⁵² Zaeni Asyhdie, Hukum Bisnis, “Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia”, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Purersada, 2005), hlm 1, dikutip dari Adi Nugroho Setiarso, Analisis Yuridis Terhadap Keadaan Insolvensi Dalam Kepailitan (Studi Normatif Pasal 2 ayat 1 Undang-undang

Dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, “pailit” diartikan sebagai debitur (yang berutang) yang berhenti membayar utang-utangnya.⁵³ Hal ini tercermin di dalam Pasal 1 *Faillissement verordening* (Peraturan Kepailitan) yang menentukan :“Setiap pihak yang berutang (debitur) yang berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, dengan Putusan Hakim, baik atas permintaan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih pihak berutangnya (Krediturnya), dinyatakan dalam keadaan pailit”.

Dalam hal Kreditur maupun debitur, UU No. 37 Tahun 2004 memberikan pengertian tentang Kreditur, Debitur, dan Debitur Pailit. Pasal 1 angka (2) menyebutkan bahwa :“Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan”

Pasal 1 angka (3) menyebutkan bahwa :“Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan”.

Pasal 1 angka (4) menyebutkan bahwa :“Debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan”.

2. Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Pailit

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU 2004, syarat permohonan pernyataan pailit yaitu apabila debitur memiliki dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Krediturnya. Jadi dapat

No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang 2013, hal.1

⁵³ Sunarmi, Hukum Kepailitan ed. 2, Medan : PT Sofmedia, 2010, hal.27

dijelaskan bahwa untuk dapat dinyatakan pailit, seorang debitur harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Debitur Memiliki Dua Kreditur atau Lebih

Syarat bahwa debitur harus mempunyai minimal dua Kreditur, sangat terkait dengan filosofis lahirnya hukum kepailitan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, hukum kepailitan merupakan realisasi dari Pasal1132 KUH Perdata. Dengan adanya pranata hukum kepailitan, diharapkan pelunasan utang-utang debitur kepada Kreditur-Kreditur (lebih dari satu Kreditur) dapat dilakukan secara seimbang dan adil. Setiap Kreditur (konkuren) mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitur.

Jika debitur hanya mempunyai satu Kreditur, maka seluruh harta kekayaan debitur otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitur tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *pro rata* dan *pari passu*. Dengan demikian, jelas bahwa debitur tidak dapat dituntut pailit, jika debitur tersebut hanya mempunyai satu Kreditur.

Istilah “Kreditur” juga sering kali menimbulkan multitafsir, apalagi di era UUK-PKPU 1998 yang tidak memberikan definisi terhadap “Kreditur”. Secara umum, ada 3 (tiga) macam Kreditur yang dikenal dalam KUHPerdata yaitu sebagai berikut:

a) Kreditur Konkuren

Kreditur konkuren ini diatur dalam Pasal1132 KUH Perdata. Kreditur konkuren adalah para Kreditur dengan hak *pari passu* dan

pro rata, artinya para Kreditur secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut. Dengan demikian, para Kreditur konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan.

b) Kreditur Preferen (yang diistimewakan)

Yaitu Kreditur yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditur preferen merupakan Kreditur yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya, sesuai Pasal 1133 dan Pasal 1134 KUHPerdata. Piutang-piutang yang diistimewakan tersebut yaitu yang terdapat dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata.

c) Kreditur separatis

Yaitu pemegang hak jaminan kebendaan in rem, yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Pada saat ini, sistem hukum jaminan Indonesia mengenal 4 (empat) macam jaminan kebendaan, yaitu hipotek, gadai/*pand*, hak tanggungan, dan fidusia.

Sehubungan dengan UUK-PKPU 1998, tidak terdapat definisi terhadap “Kreditur”. Menurut Prof. Sutan Remy Sjahdeini⁸² : “.....harus dibedakan antara pengertian Kreditur dalam kalimat”mempunyai dua atau lebih Kreditur....”, dan Kreditur dalam kalimat ”.....atas permohonan seorang atau lebih Krediturnya”.

Kata “Kreditur” yang dimaksud dalam kalimat pertama itu adalah sembarangan Kreditur, yaitu baik Kreditur konkuren maupun Kreditur preferen. Adapun kata “Kreditur” dalam kalimat yang kedua adalah Kreditur konkuren. Mengapa harus Kreditur konkuren adalah karena seorang Kreditur separatis tidak mempunyai kepentingan untuk diberi hak mengajukan permohonan pernyataan pailit mengingat Kreditur separatis telah terjamin sumber pelunasan tagihannya, yaitu dari barang agunan yang dibebani dengan hak jaminan. Apabila seorang Kreditur separatis merasa kurang terjamin sumber pelunasan piutangnya dan apabila Kreditur separatis menghendaki untuk memperoleh sumber pelunasan dari harta pailit, maka Kreditur separatis itu harus terlebih dahulu melepaskan hak separatisnya, sehingga dengan demikian berubah statusnya menjadi Kreditur konkuren”.

Pendapat tersebut juga diperkuat dengan Putusan Kasasi MA RI No. 07/K/N/1999 tanggal 4 Februari 1999 yang mengemukakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa Kreditur separatis yang tidak melepaskan haknya terlebih dahulu sebagai Kreditur separatis, bukanlah Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUK-PKPU

1998. Pendirian MA itu terbatas pada pengertian Kreditur sebagai permohonan pernyataan pailit.⁵⁴

Dengan disahkannya UUK-PKPU 2004, sebagai pencabutan UUK-PKPU 1998 telah terdapat kepastian mengenai pengertian “Kreditur”. Bagian Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU 2004 memberikan definisi Kreditur sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan “Kreditur” dalam ayat ini adalah baik Kreditur konkuren, Kreditur separatis maupun Kreditur preferen. Khusus mengenai Kreditur separatis dan Kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan”.

Dengan penjelasan dari Pasal 2 ayat (1) di atas, maka yurisprudensi dari Putusan Kasasi MA RI No. 07.PK/N/1999 tanggal 4 Februari 1999 tersebut di atas menjadi tidak terpakai, dan jelaslah bahwa UUK-PKPU 2004 memperbolehkan seorang Kreditur separatis untuk mengajukan permohonan pailit kepada debitur tanpa harus melepaskan hak agunan atas kebendaan. Hal ini tampak lebih jelas lagi dalam Pasal 138 UUK-PKPU 2004, yaitu:

”Kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutangnya tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki Kreditur konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya”.

⁵⁴ *Ibid*, hal.9

Ini berarti UUK-PKPU 2004 memberikan hak kepada Kreditur separatis dan Kreditur preferen untuk dapat tampil sebagai Kreditur konkuren tanpa harus melepaskan hak-hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya, tetapi dengan catatan bahwa Kreditur separatis dan Kreditur preferen dapat membuktikan bahwa benda yang menjadi agunan tersebut tidak cukup untuk melunasi utangnya debitur pailit. Tidak cukupnya harta debitur untuk melunasi utang-utangnya dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan atas piutang tersebut, haruslah dibuktikan. Beban pembuktian atas kemungkinan tidak dapat terlunasinya utang debitur dari penjualan benda tersebut berada di pundak Kreditur separatis atau Kreditur preferen.

b. Harus Adanya Utang

UUK 1998 tidak memberikan definisi sama sekali mengenai utang. Oleh karena itu, telah menimbulkan penafsiran yang beraneka ragam dan para hakim juga menafsirkan utang dalam pengertian yang berbeda-beda (baik secara sempit maupun luas). Apakah pengertian “utang” hanya terbatas pada utang yang lahir dari perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam-meminjam ataukah pengertian “utang” merupakan suatu prestasi/kewajiban yang tidak hanya lahir dari perjanjian utang piutang saja, seperti perjanjian jual beli. Pendapat para pakar hukum mengenai pengertian utang, yaitu :

- a) Menurut Prof. Sutan Remy Sjahdeini, pengertian utang di dalam UU No. 4 Tahun 1998 tidak seyogianya diberi arti yang sempit,

yaitu tidak seharusnya hanya diberi arti berupa kewajiban membayar utang yang timbul karena perjanjian utangpiutang saja, tetapi merupakan setiap kewajiban debitur yang berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada Kreditor, baik kewajiban itu karena perjanjian apa pun juga (tidak terbatas hanya kepada perjanjian utang piutang saja), maupun timbul karena ketentuan undang-undang, dan timbul karena putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.⁵⁵

- b) Menurut Kartini dan Gunawan Widjaja, utang adalah perikatan yang merupakan prestasi atau kewajiban dalam lapangan harta kekayaan yang harus dipenuhi oleh setiap debitur dan bila tidak dipenuhi, Kreditor berhak mendapat pemenuhannya dari harta debitur. Pada dasarnya UU Kepailitan tidak hanya membatasi utang sebagian suatu bentuk utang yang bersumber dari perjanjian pinjam-meminjam uang saja.⁵⁶
- c) Menurut Setiawan, utang seyogyanya diberi arti luas, baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah utang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang maupun kewajiban pembayaran sejumlah utang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitur harus membayar sejumlah uang tersebut.⁵⁷

Kontroversi mengenai pengertian utang, akhirnya dapat disatukan dalam Pasal 1 butir 6 UUK-PKPU yaitu:

”Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur”.

- c. Tidak Membayar Sedikitnya Satu Utang Jatuh Waktu dan Dapat

Ditagih

Syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa Kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut

⁵⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2002, hal..66.

⁵⁶ 5Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003, hal.11

⁵⁷ Lontoh, Rudhy A & et. Al. (Editor), *Hukum Kepailitan : Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Alumni, 2001, hal. 117.

debitur untuk memenuhi prestasinya. Syarat ini menunjukkan bahwa utang harus lahir dari perikatan sempurna (adanya *schuld dan haftung*). Dengan demikian, jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah (adanya *schuld* tanpa *haftung*) tidak dapat dimajukan untuk permohonan pernyataan pailit, misalnya utang yang lahir dari perjudian. Meskipun utang yang lahir dari perjudian telah jatuh waktu, hal ini tidak melahirkan hak kepada Kreditur untuk menagih utang tersebut. Maka, meskipun debitur mempunyai kewajiban untuk melunasi utang itu, Kreditur tidak mempunyai alas hak untuk menuntut pemenuhan utang tersebut. Dengan demikian, Kreditur tidak berhak memajukan permohonan pailit atas utang yang lahir dari perjudian..

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Kasus Penundaan Pembayaran Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Yang Telah Di Nyatakan Pailit

Proses Kepailitan sesungguhnya merupakan proses untuk melakukan penyitaan umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya di lakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana di atur dalam undang – undang. Pengurusan atas harta debitur yang telah di nyatakan pailit dapat di lakukan oleh :⁵⁸

- a. Hakim Pengawas
- b. Kurator
- c. Balai Harta Peninggalan.

Hakim Pengawas : menurut pasal 13 UUK, dalam putusan pernyataan pailit harus di angkat seorang Hakim Pengawas yang di tunjuk dari Hakim Pengadilan Niaga dan kurator. Dan bertugas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit seperti yang di atur dalam pasal 63 UUK. Sebelum memutuskan sesuatu yang menyangkut dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit Pengadilan Niaga wajib mendengar nasehat dari hakim pengawas.

Kurator : terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit di tetapkan maka kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas

⁵⁸ Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, Cet-1, P.T.Bayu Media, Malang, 2002, hal. 83.

harta pailit meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali (pasal 12 ayat 1 UUK).

Balai Harta Peninggalan : tugas BHP salah satunya adalah pengurusan harta kekayaan orang - orang yang di nyatakan pailit walaupun dia masih menjadi pemilik harta kekayaan tersebut namun pengurusan dan penguasaan atas harta kekayaan tersebut telah beralih pada Balai Harta Peninggalan yang bertindak sebagai pengampu atau kurator atas harta pailit (Pasal 13 ayat 2 PK) dan Balai Harta Peninggalan di tugaskan untuk melakukan pengurusan dan pemberasan harta pailit (Pasal 67 ayat 1 PK) dan di awasi oleh Hakim Komisaris (Pasal 63 PK). Harta kekayaan yang pengurusan dan penguasaannya beralih pada BHP adalah harta kekayaan yang sudah ada pada saat putusan pailit di ucapkan, maupun harta kekayaan yang akan di peroleh selama kepailitan berjalan kecuali oleh undang - undang dengan tegas di keluarkan.

Permohonan pernyataan pailit di ajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga melalui Panitera, Panitera segera mendaftarkan permohonan tersebut pada hari itu juga dan kemudian menyampaikannya kepada Ketua. Pengadilan paling lambat dua hari setelah permohonan di daftarkan. Selanjutnya, dalam waktu paling lambat 3 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan tersebut dan menetapkan hari sidang.

Sidang atas permohonan pernyataan pailit di selenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan di daftarkan. Pengadilan wajib memanggil debitur jika permohonan pailit di ajukan oleh kreditur. Dan Pengadilan juga dapat memanggil kreditur dalam hal permohonan pernyataan

pailit yang di ajukan debitur dan terdapat keraguan mengenai persyaratan untuk di nyatakan pailit.

Pemanggilan terhadap debitur, kreditur, dan pihak – pihak terkait di lakukan juru sita dengan surat kilat tercatat, paling lambat 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama di selenggarakan. Pemanggilan adalah sah dan di anggap telah di terima oleh debitur jika di lakukan oleh juru sita sesuai dengan ketentuan tersebut.

Permohonan pernyataan pailit harus di kabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk di nyatakan pailit telah terpenuhi. Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus di ucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit di daftarkan. Putusan Pengadilan wajib memuat:

- a. Pasal tertentu dari peraturan perundang - undangan yang bersangkutan dan atau sumber hukum tidak tertulis yang di jadikan dasar untuk mengadili.
- b. Pertimbangan hukum dan perbedaan pendapat dari Hakim Anggota atau Ketua Majelis.

Putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat di laksanakan terlebih dahulu kendati pun terhadap putusan tersebut di ajukan upaya hukum (Pasal 8 UUK). Salinan Putusan Pengadilan wajib di sampaikan juru sita dengan surat kilat tercatat kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit,

kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 3 hari setelah tanggal Putusan diucapkan (Pasal 9 UUK).

Putusan Pengadilan tingkat pertama dalam kasus kepailitan tidak dapat di mintakan Banding, tetapi dapat di mintakan Kasasi ke Mahkamah Agung yaitu dengan mendaftarkan kepada panitera pengadilan yang telah memutuskan permohonan pernyataan pailit.

Permohonan kasasi dapat di ajukan oleh debitur atau kreditur dan dapat di ajukan oleh kreditur lain yang bukan merupakan pihak dalam persidangan dalam tingkat pertama, yang tidak puas terhadap putusan pengadilan yang bersangkutan. Permohonan Kasasi dapat di ajukan dalam tenggang waktu 8 hari sejak tanggal putusan yang di mohonkan kasasi di ucapkan.

Pemohon Kasasi wajib menyampaikan Memori Kasasi kepada Panitera Pengadilan pada tanggal Permohonan Kasasi di daftarkan. Dalam undang - undang No. 37 Tahun 2004 tidak di atur apa - apa yang dapat di jadikan alasan untuk Permohonan Kasasi itu sehingga di pergunakan ketentuan umum Hukum Acara Perdata yang mengatur mengenai hal ini yaitu undang - undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Menurut Undang - Undang ini di jadikan Permohonan Kasasi adalah :

- a. *Judex facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya.
- b. *Judex facti* lalai memenuhi syarat - syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang - undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

- c. *Judex facti* salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku.

Apabila Permohonan Kasasi menyangkut fakta atau Pembuktian maka hal itu tidak akan di pertimbangkan oleh Mahkamah Agung karena pemeriksaan fakta - fakta atau bukti - bukti suatu perkara sudah berakhir pada pemeriksaan pada Pengadilan Niaga.

Setelah Pemohon menyampaikan Memori Kasasi, Panitera wajib menyampaikan atau mengirimkan Permohonan Kasasi beserta Memori Kasasinya kepada pihak Termohon Kasasi paling lambat setelah Permohonan di daftarkan. Kemudian Termohon Kasasi dapat mengajukan Kontra Memori Kasasi kepada Panitera Pengadilan Niaga dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal Termohon Kasasi menerima Memori Kasasi. Semua berkas perkara (termasuk Permohonan Kasasi, Memori Kasasi, Kontra Memori Kasasi dan sebagainya) wajib dikirim oleh Panitera Pengadilan Niaga ke Mahkamah Agung paling lambat 14 hari setelah tanggal Permohonan Kasasi di daftarkan. Setelah berkas Permohonan Kasasi tersebut di terima, Mahkamah Agung segera mempelajarinya dan menetapkan hari sidang paling lambat 2 hari setelah tanggal Permohonan Kasasi di terima oleh Mahkamah Agung. Dan sidang pemeriksaannya di lakukan paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima. Dan putusannya harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Agung terhadap Permohonan Kasasi tersebut memuat secara lengkap Pertimbangan Hukum yang mendasari putusan tersebut. Apabila

dalam memberikan putusan tersebut terdapat perbedaan pendapat antara anggota dan Ketua Majelis, perbedaan tersebut wajib di muat dalam Putusan Kasasi. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan Putusan Kasasi kepada Panitera Pengadilan Niaga paling lambat 3 hari setelah tanggal Putusan Kasasi di ucapkan.

Selanjutnya, setelah Putusan Kasasi di terima oleh Pengadilan Niaga, juru sita Pengadilan Niaga wajib menyampaikan Salinan Putusan itu kepada Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi, Kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 2 hari setelah putusan kasasi di terima (Pasal 13 UUK). Permohonan Kasasi dapat di ajukan oleh debitur atau kreditur dan dapat di ajukan oleh kreditur lain yang bukan merupakan pihak dalam persidangan dalam tingkat pertama, yang tidak puas terhadap putusan pengadilan yang bersangkutan.

Prosedur atau tata cara Permohonan PK sama dengan Prosedur mengajukan Permohonan Kasasi seperti yang terurai di atas. Permohonan PK dapat di ajukan apabila :

- a. Setelah perkara di putus di temukan bukti baru yang bersifat menentukan pada waktu perkara di periksa di Pengadilan sudah ada tetapi belum di temukan. Atau
- b. Dalam Putusan Hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Pengajuan Permohonan PK berdasarkan alasan yang di sebut angka 1 di atas di lakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 hari setelah tanggal putusan yang di mohonkan PK memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan, pengajuan

permohonan PK berdasarkan alasan yang di sebut angka 2 dalam jangka 30 hari terhitung sejak putusan yang di mohonkan PK memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 296).

Permohonan PK di sampaikan kepada Panitera Pengadilan Niaga dan Panitera mendaftarkan Permohonan PK tersebut pada tanggal permohonan di ajukan dan kepada pemohon di beri tanda terima secara tertulis yang di tanda tangani panitera pada tanggal yang sama dengan tanggal permohonan di daftarkan. Kemudian, Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan Permohonan PK kepada Panitera Mahkamah Agung dalam jangka waktu 2 hari setelah tanggal permohonan di daftarkan

Pihak yang mengajukan PK wajib menyampaikan bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan PK kepada Panitera Pengadilan Niaga pada saat Permohonan PK di daftarkan . kemudian Panitera menyampaikan salinan Permohonan PK tersebut dan bukti pendukungnya kepada Termohon PK dalam jangka waktu paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan di daftarkan. Kemudian termohon PK dapat mengajukan jawaban terhadap pemohon PK dalam jangka waktu 10 hari terhitung sejak permohonan di daftarkan.

Panitera pengadilan wajib menyampaikan jawaban kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 12 hari setelah tanggal permohonan di daftarkan (Pasal 297 UUK). Setelah menerima berkas Permohonan PK, Mahkamah Agung segera memeriksa dan memutuskan Permohonan PK itu paling lambat 30 hari sejak tanggal Permohonan PK di terima panitera mahkamah agung. Putusan Mahkamah Agung atas Permohonan PK ini juga harus di bacakan dalam

sidang yang terbuka untuk umum. Selain itu dalam jangka waktu paling lambat 32 hari sejak Permohonan PK di terima panitera Mahkamah Agung, salinan Putusan PK disampaikan kepada para pihak (Pasal 298 UUK).⁵⁹

B. Akibat Hukum Debitur yang Melakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Putusan Pernyataan Pailit membawa akibat Hukum terhadap Debitur. Dalam pasal 21 Undang – undang No. 37 Tahun 2004.

1. Sejak di ucapkannya putusan Kepailitan oleh Hakim maka putusan tersebut berakibat yuridis terhadap diri si pailit, harta kekayaannya juga terhadap pihak ketiga.
 - a) Seluruh harta kekayaan si pailit jatuh dalam keadaan pensitaan umum yang bersifat konservator.
 - b) Si pailit kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya sendiri.
 - c) Harta kekayaan si pailit di urus dan di kuasai oleh Balai Harta Peninggalan untuk kepentingan semua para kreditur.
 - d) Dalam putusan hakim tersebut di tunjuk seorang hakim komisariss yang bertugas untuk memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan itu.
 - e) Kepailitan itu semata – mata hanya mengenai harta kekayaan si pailit saja dan tidak mengenai diri si pailit.⁶⁰

⁵⁹ H. Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 187.

Dari ketentuan pasal 21 tersebut di ketahui bahwa Kepailitan merupakan sita umum, dengan demikian hendak di hindari adanya sita perorangan. Di sini pembentuk Undang – undang memandang perlu untuk memungkinkan adanya eksekusi missal artinya melakukan sitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitur untuk kepentingan semua kreditur yang bersangkutan yang di jalankan dengan pengawasan seorang Hakim Pengawas. Dan sita umum tersebut bersifat konservatoir artinya bersifat penyimpanan bagi kepentingan semua kreditur yang bersangkutan.

Zainal asikin, menguraikan beberapa akibat hukum dari putusan pailit, hal utamanya adalah dengan di jatuhkannya putusan kepailitan dimana si debitur kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya karena harta benda tersebut beralih ke tangan kurator atau balai harta peninggalan. Namun tidak semua harta bendanya akan beralih penguasaan dan pengurusannya, seperti :

- a. Benda, termasuk hewan yang benar – benar di butuhkan sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya yang di pergunakan oleh debitur dan keluarganya dan bahkan makanan untuk (30 hari) bagi debitur dan keluarganya
- b. Segala sesuatu yang di peroleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian suatu jabatan atau jasa, upah, uang tunggu, dan uang tunjangan sejauh yang di tentukan oleh hakim pengawas.

⁶⁰ H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 8 Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, P.T. Djambatan, Jakarta, 1985, hal 36.

- c. Uang di berikan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya member nafkah. (pasal 22 UU No. 37 Tahun 2004).

Debitur yang telah di nyatakan pailit kehilangan segala “hak perdata” untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah di masukkan ke dalam harta pailit. Hal ini berlaku bagi suami atau istri dari debitur pailit yang kawin dalam persatuan harta kekayaannya.⁶¹

Ini di kemukakan pada pasal 24 Undang – undang No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa :

- a. Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit di nyatakan
- b. Tanggal putusan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di hitung sejak pukul 00.00 waktu setempat.
- c. Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit di ucapkan telah di laksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank pada tanggal putusan sebagaimana di maksud pada ayat (1) transfer tersebut wajib di teruskan.

Dalam pasal ini dapat di jelaskan bahwa dalam hal debitur adalah Perseroan Terbatas, organ perseroan tersebut tetap berfungsi dengan ketentuan jika dalam pelaksanaan fungsi tersebut menyebabkan berkurangnya harta pailit maka pengeluaran uang yang merupakan bagian harta pailit adalah wewenang kurator, putusan pailit mulai berlaku sejak pukul 00.00 waktu setempat artinya bila

⁶¹ Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis: Kepailitan, Cet-4, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 30

sebelum putusan pernyataan pailit di ucapkan telah di laksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank pada tanggal putusan maka transfer tersebut wajib di teruskan, demikian pula bila sebelum putusan pernyataan pailit di ucapkan telah di laksanakan transaksi efek di bursa efek maka transaksi tersebut wajib di selesaikan. Sedangkan waktu setempat adalah waktu tempat putusan pernyataan pailit di ucapkan

Yang di maksud dengan harta kekayaan adalah semua barang dan hak atas benda yang dapat di uangkan (*ten gelde kunnen worden gemaakt*). Kepailitan juga berlaku terhadap semua harta kekayaan debitur yang berada di luar negeri dan ini dapat di lakukan sita umum dengan memperhatikan asas teritorialitas.

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan si debitur pada saat pernyataan pailit, beserta segala apa yang di peroleh selama kepailitan. Dalam pasal 21 Undang - Undang kepailitan yang membahas akibat kepailitan mengatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit di ucapkan serta segala sesuatu yang di peroleh selama kepailitan. Dalam pasal tersebut terdapat pertama – tama perkataan - perkataan “seluruh kekayaan si debitur”, yang memberi alasan untuk : Kekayaan si debitur, jadi kalau diantara barang - barang yang dikuasai oleh si debitur itu terdapat barang - barang milik orang lain, maka barang - barang yang di sebut terakhir ini, tidak termasuk kekayaan si debitur, jadi tidak pula termasuk kepailitan ; oleh karena itu balai harta peninggalan harus mengembalikannya kepada si pemilik barang - barang itu. Sehubungan dengan ini, ada baiknya kiranya penulis kemukakan di sini peristiwa sebagai berikut; Si A, telah menyewa barang - barang bergerak dari si B dan Si B,

telah menyerahkan barang - barang tersebut kepada si A. Jadi, menurut hukum si A adalah pemilik barang - barang tersebut, tetapi harga barang - barang tersebut belum di bayar oleh si A. Kemudian si A di nyatakan pailit. Dalam hal ini si B berhak menuntut kembali barang - barang tersebut dan melepaskannya dari kepailitan, dalam jangka waktu dan dengan syarat - syarat yang di tentukan oleh undang – undang Pasal 38 Undang – undang Kepailitan membedakan akibat pernyataan pailit untuk perjanjian sewa – menyewa dengan uang muka dan tanpa uang muka, khusus untuk perjanjian sewa – menyewa dengan uang muka jika uang muka sewa telah di bayar maka perjanjian sewa tersebut tidak dapat di hentikan kecuali menjelang hari berakhirnya pembayaran di muka jangka waktu tersebut. Akan tetapi terhadap sewa – menyewa pada umumnya baik kurator maupun pihak yang menyewakan barang berhak untuk menghentikan sewa tersebut. Dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku mengenai penghentian di percepat, yang di atur dalam perundang – undangan, perjanjian maupun kebiasaan yang berlaku dengan tenggang waktu tidak kurang dari 3 bulan pemberitahuan di muka, sejak hari pernyataan pailit berlaku uang sewa merupakan utang harta pailit.

Akibat - akibat penting terhadap kepailitan terutama bagi debitur , baik materil maupun moril.

Terhadap diri si pailit :

Seorang debitur yang di nyatakan pailit kehilangan nama baiknya, dalam masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi penguasa dalam lingkungan usahanya. Dari segi materil kehilangan kepercayaan untuk mendapatkan kredit.

Pasal 21 dan pasal 24 ayat 1 dan 2 Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 yang mengatur tentang akibat kepailitan yang berbunyi Pasal 21 : Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit di ucapkan serta segala sesuatu yang di peroleh selama kepailitan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dari hasil penelitian dan berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian, maka dapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian Kasus yang telah di nyatakan Pailit: Di lakukan di Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan peradilan umum yang di ketuai oleh ketua Pengadilan Negeri karena ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan juga membawahkan Pengadilan Niaga. Perkara – perkara Kepailitan menurut UUK – PKPU di tentukan jangka waktu pemeriksaannya di tingkat Pengadilan Niaga, di tingkat kasasi, dan di tingkat Peninjauan Kembali. Dan tidak ada upaya Banding terhadap putusan pengadilan niaga hal ini bertujuan agar perkara Kepailitan akan berjalan lebih cepat.
2. Akibat-akibat Hukum yang di timbulkan dengan adanya pernyataan pailit : Debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit di ucapkan (sejak pukul 00.00 waktu setempat). Kepailitan hanya mengenai harta pailit tidak mengenai barang – barang perlengkapan si pailit seperti (tempat tidur, pakaian, alat – alat pertukangan, buku – buku yang di perlukan dalam pekerjaan, makanan dan minuman untuk satu bulan, uang yang di terima dari upah atau gaji

dan dari pendapatan anak – anaknya) dan tidak mengenai diri pribadi debitur pailit. Dalam hal ini Harta pailit di urus dan di kuasai kurator untuk kepentingan semua kreditur dan debitur, dan Hakim Pengawas memimpin serta mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan.

B. Saran

Setelah penulis mengambil beberapa kesimpulan dari data dan informasi yang telah di analisa, maka penulis akan mencoba untuk memberikan beberapa saran. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan antara lain :

1. Bahwa dalam hal penyelesaian kasus yang telah di nyatakan pailit para debitur dapat mengajukan upaya – upaya hukum untuk segera membebaskan dirinya dari masalah kepailitan.
2. Bahwa dalam hal ini para debitur yang telah di nyatakan pailit dapat memahami akibat – akibat hukum yang ada sehingga si debitur dapat segera melunasi utang – utangnya, agar ia dapat melanjutkan segala usahanya

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Chidir Mohammad, H. Mashudi, H. Achmad Samsudin, *Hukum Kepailitan*, Cet-1, C.V. Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Ali, Mohamad Chaidir. *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Asikin Zainal, *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran Di Indonesia*, Cet-2, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Fuady Munir, *Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori dan Praktek)*, Cet-1, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Hartini Rahayu, *Hukum Kepailitan*, Cet-1, Bayu Media, Malang, 2003.
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran (Failissement en Surseance van betaling)*, Cet-3, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Muljadi Kartini, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Cet-1, Alumni, Bandung, 2001.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Purwosutjipto H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 8 perwasitan, kepailitan dan penundaan pembayaran*, Djambatan.
- Sastrawidjaja S Man. H, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menurut Undang – undang No. 37 Tahun 2004 dan Undang – undang No. 4 Tahun 1998 (suatu telaah perbandingan)*, Cet-1, P.T. Alumni, Bandung, 2006.
- Situmorang M Victor, Hendri Soekarso. *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*. P.T. Rineka Cipta, Jakarta.

- Sjahdeni, Sutan Remi. *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012
- Soekanto Soedjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 9, Jakarta: Rajawali Press. 2006.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988.
- Suparni Niniek, *KUHD & Kepailitan*, Cet-1, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan Edisi 2*, Cet-1, P.T. SOFMEDIA, Jakarta, 2010.
- Syaifuddin, Muhammad Syaifuddin. *Hukum Kontrak*, Bandung: CV Mandar Jaya, 2016.

Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (*wet boek van kophandel*)

Kitab Undang – Undang Hukum Kepailitan (*failissement verordening*)

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mohamad Sarifudin

NPM : 5115500108

Tempat/Tanggal Lahir : Tegal/21 April 1996

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jalan pangauripan No17 RT.003/RW.003 Desa Babakan

Kecamatan Kramat

Riwayat Pendidikan :

No.	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1	SD Negeri Babakan 01	2002	2008
2	SMP Negeri 2 Kramat	2008	2011
3	SMA Negeri 1 Kramat	2012	2015
4	S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal	2015	-

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, 1 Februari 2021

Hormat saya,

(Mohamad Sarifudin)

